

# Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Keuangan: Studi Pada BUMNAg di Sumatera Barat (Capacity Building for Village-Owned Enterprises in Financial Management: a Study on BUMNAg in West Sumatra)

Rita Rahayu<sup>1\*</sup>, Husna Roza<sup>2</sup>, Sri Dewi Edmawati<sup>3</sup>, Abdul Karib<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat <sup>1,2,3,4</sup>

[aretrahayu@gmail.com](mailto:aretrahayu@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [husnaroza@eb.unand.ac.id](mailto:husnaroza@eb.unand.ac.id)<sup>2</sup>, [sriedmawati@yahoo.co.id](mailto:sriedmawati@yahoo.co.id)<sup>3</sup>,

[abdulkarib@eb.unand.ac.id](mailto:abdulkarib@eb.unand.ac.id)<sup>4</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 30 November 2021

Revisi 1 pada 1 Desember 2021

Revisi 2 pada 14 Desember 2021

Revisi 3 pada 23 Desember 2021

Disetujui pada 3 Februari 2022

## Abstract

**Purpose:** The activity aims to improve the ability of BUMDes managers in terms of financial management. The reason for this activity is that the understanding and ability of BUMDes managers, especially in West Sumatra, is still low regarding financial management.

**Method:** The method used in this activity is to carry out ongoing training and mentoring programs, which are carried out for a period of 6 months.

**Result:** It is hoped that the activities carried out in a sustainable manner will certainly increase the ability and understanding of BUMDes managers, especially those in West Sumatra in terms of financial management. One of the outputs of this activity is that BUMDes are able to prepare their financial reports.

**Conclusion:** This training and mentoring activity is very useful, especially with the issuance of PP No. 11 of 2021 concerning BUMDes, one of which is to require BUMDes to compile accountability reports in the form of periodic financial reports.

**Contribution:** This activity will certainly contribute in terms of developing the capacity of human resources in the village, and will certainly have a positive impact on improving the village economy.

**Keywords:** BUMDes, Financial Reports, Financial Planning, West Sumatra

**How to cite:** Rahayu, R., Roza, H., Edmawati, S. D., Karib, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Keuangan: Studi Pada BUMNAg di Sumatera Barat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1), 7-13.

## 1. Pendahuluan

Di dalam Peraturan [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015](#) (Disingkat Dengan Permendes No 4 Tahun 2015) Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 3 disebutkan bahwa tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. BUMDes diharapkan dapat menjadi ujung tombak pembangunan di desa ([Ariutama dkk, 2019](#)), sehingga diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dapat tercapai.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lima tahun setelah Permendes ini dikeluarkan, hasil yang dicapai oleh BUMDes tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak desa di Indonesia yang bahkan masih belum mendirikan badan usaha ini, dan walaupun ada yang telah mendirikannya, hasilnya masih jauh dari harapan. [Anggraeni \(2017\)](#) dan [Srirejeki \(2018\)](#) bahkan menemukan bahwa BUMDes belum mampu membawa perubahan yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut data yang disampaikan [Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2019](#) menyebutkan bahwa jumlah BUMDes di Indonesia sudah mencapai angka 45.549 unit. Angka ini tentunya terus bertambah di tahun 2021 ini. Di Sumatera Barat sendiri, menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, jumlah BUMDes atau kalau di Sumatera Barat dikenal dengan sebutan BUM Nagari atau BUMNag adalah sebanyak 858 yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Namun dari angka tersebut diketahui bahwa jumlah BUMAg yang berkembang tidak sampai setengahnya, yaitu sebanyak 327 BUMNag.

Padahal seperti kita ketahui, jumlah dana yang disalurkan untuk badan usaha ini sudah cukup banyak. Menurut data dari situs Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK RI), sampai dengan tahun 2020 lalu Dana desa yang sudah disalurkan sudah mencapai angka 858,8 triliun untuk seluruh Indonesia, dan untuk Sumatera Barat sendiri adalah 992 Miliar. Seharusnya dengan jumlah tersebut diharapkan perekonomian desa menjadi lebih maju dan berkembang. Namun kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan.

Kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan BUMDes atau BUMNag ini sulit untuk berkembang. Beberapa penelitian terdahulu yang mencoba untuk mengkaji faktor-faktor penghambat berkembangnya BUMDes atau BUMNag ini, seperti [Mayu dan Adlin \(2016\)](#), [Ariadi dan Sudarso \(2018\)](#) dan [Ufida \(2021\)](#). Dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat berkembangnya BUMDes ini adalah terkait dengan sumber daya manusia, salah satunya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang andal. Hal senada juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [Sofyani et.al \(2019\)](#) dan [Yudiardi dan Karlina \(2017\)](#) yang menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia menjadi faktor penting penentu suksesnya BUMDes. Hal ini disebabkan karena memang SDM yang memiliki potensi yang baik lebih cenderung untuk memilih pindah ke kota dibandingkan dengan tetap tinggal didesa ([Rahayu, 2021](#)). Akibatnya, tentu saja saat ini desa-desa mengalami krisis SDM yang andal dan kondisi ini banyak dijumpai di hampir seluruh desa di Indonesia, termasuk desa atau nagari di Sumatera Barat.

Namun demikian tentunya kondisi ini tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mengembangkan BUMDes atau BUMNag tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, LSM ataupun kalangan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM pengelola BUMDes/BUMNag. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pengelola BUMNag ini adalah kemampuan terkait dengan pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan keuangan sampai dengan tahap pelaporan keuangan berupa penyusunan laporan keuangan. Namun seperti telah dijelaskan diatas, kemampuan pengelola BUMNag mengenai pengelolaan keuangan ini masih sangat lemah. Padahal seperti kita ketahui, saat ini pemerintah telah mengeluarkan [Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021](#) tentang Badan Usaha Milik Desa yang salah satunya mengatur tentang kewajiban pertanggungjawaban pengelola BUMNag berupa penyusunan laporan keuangan semesteran yang terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan. Hal ini tentunya menjadi keharusan bagi pengelola BUMNag untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang pencatatan dan pengelolaan keuangan ini. Selain itu, dengan keluarnya Permendesa PDTT No 3 tahun 2021 yang mewajibkan seluruh Badan Usaha Milik Desa/Nagari untuk mendaftarkan BUMNag mereka ke Sistem Informasi Desa (SID) Kemendes dan Kemenkumham, yang salah satu syaratnya adalah adanya proyeksi Laba Rugi tahun mendatang dan juga proyeksi posisi keuangan/neraca tahun mendatang serta proyeksi harga pokok penjualan tahun mendatang, yang kesemuanya hanya bisa disusun jika pengelola keuangan memiliki kemampuan yang memadai mengenai pencatatan dan pengelolaan keuangan ini.

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola BUMNag di Sumatera Barat, maka Tim pengabdian dari Universitas Andalas merasa perlu untuk berkontribusi dengan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan kepada pengelola BUMNag di Sumatera Barat. Sebelum melakukan kegiatan ini tentunya tim terlebih dahulu melakukan proses identifikasi dan juga melakukan survey terhadap seluruh pengelola BUMNag yang ada di Sumatera Barat

## 2. Metode

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas terlihat bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola BUMNag di Kecamatan Kubung dan Hiliran Gumanti terkait dengan pengelolaan keuangan BUMNag. Adapun dalam pelaksanaannya, akan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu: tahap perencanaan, tahap survey, tahap pelatihan dan pendampingan serta tahap evaluasi. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu 6 bulan dimulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021.

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dimana tim peneliti melakukan identifikasi dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai kondisi BUMNag di Sumatera Barat. Setelah mengidentifikasi kondisi BUMNag ini, tahapan berikutnya adalah dengan melakukan survey terkait dengan tingkat pemahaman dan literasi keuangan pengelola BUMNag di Sumatera Barat. Tahap berikutnya adalah tahapan pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan untuk beberapa BUMNag di Sumatera Barat. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan telah memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan untuk setiap tahap kegiatan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

### *Tahap Perencanaan*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait dengan kondisi BUMNag di Sumatera Barat. Berdasarkan data yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, saat ini terdapat 858 BUMNag yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berikut ini adalah sebaran dan kondisi BUMNag yang ada di Sumatera Barat.

Tabel 1. Jumlah BUMNag di Sumatera Barat tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	BUMDes	Desa	Klasifikasi BUMDes			
				Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Pesisir Selatan	182	183	15	156	11	0
2	Solok	58	74	17	25	9	7
3	Sijunjung	61	61	20	13	20	8
4	Tanah Datar	72	75	0	28	44	0
5	Padang Pariaman	83	103	0	9	65	9
6	Agam	76	82	8	26	37	5
7	Lima Puluh Kota	69	79	2	11	52	4
8	Pasaman	37	37	5	30	2	0
9	Kepulauan Mentawai	41	43	34	4	3	0
10	Dharmasraya	52	52	4	7	37	4
11	Solok Selatan	38	39	0	16	21	1
12	Pasaman Barat	19	19	7	0	11	1
13	Kota Sawahlunto	23	27	4	11	6	2
14	Kota Pariaman	47	55	25	13	9	0
Total		858	928	141	349	327	41

Sumber: [Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat \(2020\)](#)

Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa dari 928 desa atau nagari yang ada di Sumatera Barat, hanya 858 nagari yang telah membentuk BUMNag. Ini menunjukkan bahwa masih ada nagari-nagari di Sumatera Barat yang masih belum memiliki BUMNag. Dari tabel juga terlihat bahwa dari 858 BUMNag yang tersebar di 14 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, hanya 41 BUMNag yang dapat dikategorikan sebagai BUMNag yang maju, sisanya lebih dari 90% nya masih masuk kategori rintisan, tumbuh dan berkembang. Dari tabel diatas juga terlihat bahwa masih ada kabupaten atau kota yang belum memiliki BUMNag dengan kategori maju, seperti Pesisir Selatan, Tanah Datar, Pasaman, Kepulauan Mentawai,

dan Kota Pariaman. Kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan, dan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan BUMNag di Sumatera Barat ini masih belum optimal.

### ***Tahap Survey***

Setelah mendapatkan data dan informasi mengenai BUMNag di Sumatera Barat, tahap berikutnya adalah dengan melakukan survey dengan menggunakan kuisioner yang dibuat dalam google form dan disebarkan melalui whatsapp group oleh Tim Ahli Pengembangan Ekonomi Desa se Sumatera Barat kepada pengelola BUMNag di Sumatera Barat. Survey ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh pengelola BUMNag selama ini dan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pengelola BUMNag dalam mengelola usahanya.

Sebanyak 112 pengelola BUMNag di Sumatera Barat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Berikut ini adalah karakteristik responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini:

Tabel 2. Karakteristik Responden

<b>Karakteristik Berdasarkan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>% tase</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	56	0.50
	Wanita	56	0.50
Umur	20-30 tahun	42	0.38
	31-40 tahun	31	0.28
	41-50 tahun	33	0.29
	51-60 tahun	6	0.05
	Diatas 60 tahun	0	0
Tingkat pendidikan	Sampai dengan SMP sederajat	0	0
	SMA sederajat	76	36.5
	Diploma I, II, III	33	15.9
	Sarjana/D4	90	43.3
	Pasca Sarjana (S2)	6	2.9
Latar Belakang bidang pendidikan	Ekonomi	35	0.31
	Non ekonomi	77	0.69

Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa jumlah pengelola BUMNag yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan adalah berimbang, yaitu sebanyak 56 orang. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa usia pengelola BUMNag bervariasi dari umur 20 tahun sampai dengan 60 tahun, namun demikian sebagian besarnya adalah mereka yang berusia muda yaitu antara umur 20 sampai dengan 50 tahun, dan hanya sebagian kecil yang berusia diatas 60 tahun. Untuk tingkat pendidikan, terlihat bahwa sebagian besar pengelola BUMNag telah memiliki pendidikan yang memadai yaitu SMA sederajat, Diploma I, II, dan III, IV serta Sarjana, yaitu sebanyak 106 orang. Bahkan 6 orang diantaranya adalah berpendidikan Pasca Sarjana/Magister. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengelola BUMNag telah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai. Hal ini tentunya dapat menjadi kekuatan bagi BUMNag untuk dapat berkembang lebih baik lagi.

Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan bahwa dari 112 pengelola BUMNag di Sumatera Barat, hanya 35 orang yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, sisanya yaitu sebanyak 77 orang memiliki latar belakang pendidikan selain ekonomi, seperti pendidikan, Teknik, Bahasa, seni, olah raga, farmasi, pertanian dan peternakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar mereka mungkin belum memiliki pengetahuan dasar yang memadai tentang pengelolaan keuangan BUMNag ini.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari kuisioner ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh pengelola BUMNag saat ini. Hasil dari survey ini nantinya dapat menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk merancang kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahapan selanjutnya. Hasil pengolahan kuisioner menunjukkan bahwa sebagian besar BUMNag melakukan perencanaan keuangan dengan menyusun anggaran keuangan seadanya saja, bahkan 10 diantaranya belum melakukan perencanaan keuangan ini. Hal yang sama juga terlihat dalam pendokumentasian transaksi, pencatatan buku kas masuk, buku hutang, buku piutang, buku kas keluar, jurnal, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal, dimana sebagian besar menyusunnya dengan seadanya saja dan bahkan masih banyak pengelola BUMNag yang belum melakukannya sama sekali

Hal ini tentunya cukup memprihatinkan, karena seperti yang diamanatkan dalam [Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021](#) tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelola BUMDes ini wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban usaha mereka secara berkala. Ditambah lagi dengan dikeluarkan nya [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.3 tahun 2021](#) tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang mewajibkan BUMDes dan BUMDes Bersama untuk mendaftarkan badan usahanya ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Sistem Informasi Desa (SID). Untuk dapat mendaftarkan diri ke SID ini, BUMDes dan BUMDes Bersama wajib membuat laporan proyeksi laba rugi, proyeksi posisi keuangan, proyeksi harga pokok penjualan dan juga rasio-rasio keuangan lainnya, yang kesemuanya hanya bisa disusun dengan baik jika pengelola BUMDes/BUMNag memiliki kemampuan yang memadai mengenai pencatatan dan pengelolaan keuangan ini.

Selanjutnya penelitian ini juga mencoba untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengelola BUMNag dalam pengelolaan usahanya. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pengelola BUMNag di Sumatera Barat ini adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang pengelolaan keuangan ini, mulai dari perencanaan keuangan, pencatatan keuangan sampai dengan pelaporan keuangan. Sehingga berdasarkan hasil survey ini, tim pengabdian selanjutnya merancang kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk BUMNag di Sumatera Barat ini. Oleh karena jumlah BUMNag yang cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat, maka tim pengabdian memilih beberapa BUMNag saja, yang dipilih berdasarkan convenience sampling. Dalam hal ini pengabdian memilih BUMNag yang berlokasi di kecamatan KUBUNG dan kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

#### ***Tahap Pelatihan dan Pendampingan***

Seperti dijelaskan sebelumnya, kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan akan difokuskan pada BUMNag yang berada di kecamatan Kubung dan Kecamatan Hiliran Gumanti.

Kegiatan pelatihan akan dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu:

- Kegiatan 1: Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Pengelola BUMNag di Kecamatan Kubung kabupaten Solok – pemahaman dasar-dasar akuntansi
- Kegiatan 2: Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Pengelola BUMNag di Kecamatan Kubung kabupaten Solok – pemahaman Siklus Akuntansi
- Kegiatan 3: Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Pengelola BUMNag di Kecamatan Kubung kabupaten Solok – Penyusunan Laporan Keuangan.

Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Oktober 2021 lalu, dan dihadiri oleh pengelola BUMNag di Kecamatan Kubung dan Kecamatan Hiliran Gumanti, yang terdiri dari ketua BUMNag dan juga Sekretaris dan Bendahara pengelola BUMNag. Hadir juga dalam kesempatan ini adalah camat dan juga Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan saja yang terdiri dari perencanaan keuangan, pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan saja tapi dalam pelatihan juga diberikan tentang tata kelola BUMDes yang baik serta pemahaman mengenai penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana operasional bisnis.

Hasil dari kegiatan ini tentunya adalah diharapkan terjadinya peningkatan pemahaman dan kemampuan pengelola BUMNag di Sumatera Barat pada umumnya dan Kecamatan Kubung khususnya dalam membuat perencanaan keuangan, pencatatan transaksi keuangan serta pelaporan keuangan. Diharapkan pengelola BUMNag ini sudah mampu untuk membuat dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan harga pokok penjualan, laporan perubahan modal dan juga mampu untuk membuat proyeksi atas laporan keuangan tersebut. Sehingga target untuk mendaftarkan seluruh BUMNag di Sumatera Barat khususnya di kecamatan Kubung di akhir Desember ini dapat tercapai.

Tim pengabdian juga menyadari bahwa kegiatan pelatihan saja belumlah cukup, sehingga tim pengabdian juga melakukan kegiatan pendampingan untuk BUMNag ini. Pendampingan dilakukan dengan cara mendampingi mereka dalam penyusunan anggaran dan juga pencatatan keuangan serta pelaporan keuangan nya.

#### ***Tahap Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan***

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melihat tingkat pemahaman pengelola BUMNag di Kecamatan Kubung dan Kecamatan Hiliran Gumanti. Dari evaluasi yang dilakukan oleh tim pengabdian terlihat bahwa pemahaman pengelola BUMNag sudah mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam membedakan antara Asset, Liabilities dan Ekuitas. Mereka juga sudah mulai memahami tentang manfaat buku kas, buku piutang, buku hutang, dan buku persediaan. Mereka sudah mampu untuk mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal, dan juga memindahkannya ke buku besar. Pengelola BUMNag di kecamatan Kubung juga sudah mulai memahami berbagai jenis laporan keuangan. Setelah mengikuti pelatihan ini terlihat bahwa pengelola BUMNag sudah mulai menyadari pentingnya pemahaman pengelolaan keuangan ini, hal ini terlihat dari besarnya antusiasme mereka untuk bertanya dan meminta untuk melakukan pelatihan lanjutan.

Sehingga berdasarkan pengamatan tim pengabdian, hasil pelaksanaan kegiatan ini cukup baik dan efektif. Namun demikian, tentunya masih diperlukan pelatihan-pelatihan lanjutan agar dapat meningkatkan pemahaman mereka ke level yang lebih tinggi, yaitu mampu untuk menyusun laporan keuangan.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini masih banyak BUMNag di Sumatera Barat yang masih belum melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar BUMNag masih belum melakukan pencatatan atau perencanaan keuangan dengan baik, bahkan masih ada BUMNag yang sama sekali belum melakukan perencanaan dan juga pencatatan akuntansi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan pengelola BUMNag terkait dengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengelola BUMNag melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan terjadinya peningkatan kapasitas pengelola BUMNag di Sumatera Barat umumnya dan Kecamatan Kubung khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ini tentunya belum mampu untuk memberikan perubahan besar bagi BUMNag di Sumatera Barat, karena kegiatan pelatihan ini hanya dilakukan di lingkungan kecamatan Kubung saja yang hanya memiliki 7 nagari, sementara di Sumatera Barat masih terdapat lebih dari 800 nagari lagi yang belum tersentuh kegiatan ini.

Sebenarnya jika seluruh perguruan tinggi memiliki komitmen yang sama untuk pengembangan BUMNag ini, tentunya seluruh BUMNag di Sumatera Barat ini dapat ikut dalam kegiatan ini. Saat ini, berdasarkan data dari LL Dikti Wilayah X di Sumatera Barat terdapat 67 perguruan tinggi yang terdiri dari Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi dan Pendidikan Vokasi. Tentunya, jika semua PT ini memiliki komitmen dan keseriusan dalam membantu BUMNag yang ada di Sumatera Barat ini, melalui

kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop maupun pendampingan, maka sudah dapat dipastikan bahwa peningkatan kemampuan pengelola BUMNag ini bisa menjadi suatu keniscayaan

### **Ucapan terima kasih**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang telah memberikan dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik

### **Referensi**

- Anggraeni, M. R. R. S. (2017). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta*.
- Ariadi, S., & Sudarso, S. (2018). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), 169-182.
- Ariutama, I. G. A., Saputra, A. H., & Sukmono, R. (2019). The Role of Village-owned Enterprises (Bumdes) to Rural Development: a Comparative Institutional Analysis. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 3(3).
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat (2020), *Data Badan Usaha Milik Nagari di Sumatera Barat*.
- Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (2019). *Data Badan Usaha Milik Desa di Indonesia*.
- Mayu, Welli I., and Adlin Adlin (2016), "Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3(2), 1-11.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.3 tahun 2021 tentang *Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*.
- Rahayu, Rita. (2021) Pentingnya Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDEs dalam Pengelolaan Keuangan. *Koran Padang Ekspres*, halaman 4.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success factors of village-owned enterprises (BUMDes) performance in indonesia: An exploratory study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44-58.
- Srirejeki, K. (2018). Empowering the role of village owned enterprises (BUMDes) for rural development: case of Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 20(1), 5-10.
- Ufida, N. (2021). *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Studi Kasus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban*.
- Yudiardi, D., & Karlina, N. (2017). Identification Of Supporting and Inhibiting Factors of Bumdes (Village-Owned Enterprises) Village Development Planning in Sukarame District Garut. *Global Journal of Politics and Law Research*, 5(1), 1-14.